



Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya)

Jamalia Wahda^{1✉}, Abdul Sadad²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: jamalia.wahda0222@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Persoalan Drainase di Kota Pekanbaru yang tidak kunjung tuntas menjadi sebuah dilema. Permasalahan titik banjir yang disebabkan oleh saluran drainase yang tidak berjalan dengan baik. Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola drainase terus berupaya melakukan pemeliharaan terhadap drainase yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menilai kinerja serta untuk menentukan dan menganalisis masalah yang mengganggu kinerja. Teori Agus Dwiyanto (2008) yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator berikut: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja DPUPR Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh Produktivitas Kinerja DPUPR pada pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permasalahannya. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota Pekanbaru melalui Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air rutin melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari. Responsivitas DPUPR dalam melakukan pengelolaan drainase sudah baik, hal itu dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Responsibilitas DPUPR pada hal pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru telah berbanding bersama prinsip administrasi atau kebijakan organisasi, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Akuntabilitas DPUPR pada penataan drainase di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini didasarkan pada rencana kerja serta disesuaikan pada perealisasi program melalui perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021. Hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru yaitu, keadaan prasarana dan sarana yang ada di Dinas PUPR Kota Pekanbaru, serta

masyarakat yang kurang sadar dalam menjaga lingkungan serta masih membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci : *Managing, Drainage, and Dinas PUPR*

Abstract

The unresolved drainage problem in Pekanbaru City has become a dilemma. Problems with flood points caused by drainage channels that are not working properly. The PUPR Office of Pekanbaru City, which assists the local government in managing drainage, continues to make efforts to maintain the existing drainage in Pekanbaru City. This research is intended to explain and assess performance as well as to determine and analyze problems that interfere with performance. Agus Dwiyanto's theory (2008) applied in this study uses the following indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach and is descriptive in nature. The results of the study show that the performance of the Pekanbaru City DPUPR is still not good. This is caused by the productivity of the DPUPR in drainage management which is still not effective, because there are still many flood points which are the problem. DPUPR service quality in drainage management is good. Pekanbaru City DPUPR through the Highways and Water Resources Team routinely cleans drainage in Pekanbaru City every day. The responsiveness of the DPUPR in managing drainage has been good, this can be seen from the actions taken after receiving reports from the public. The DPUPR's responsibility for drainage management in Pekanbaru City is directly proportional to administrative principles or organizational policies, by following existing procedures. The DPR's accountability for drainage management in Pekanbaru City is good. This is based on a work plan and adjusted for the realization program through a comparison from 2020 to 2021. Obstacles to the Public Works and Spatial Planning Office in managing drainage in Pekanbaru City, namely, the condition of existing infrastructure and facilities at the PUPR Office of Pekanbaru City, as well as people who lack aware of protecting the environment and still littering carelessly.

Keywords: *Manage, Drainage, and Public Works Department*

PENDAHULUAN

Ibukota dan kota terbesar di provinsi Riau Indonesia ialah Pekanbaru. Kota metropolitan yang mencakup tempat-tempat pada jenjang urbanisasi, migrasi, dan pertumbuhan yang signifikan ini, merupakan salah satu pusat ekonomi utama Sumatera. Alhasil, Kota Pekanbaru terus berubah dan berkembang, serta pertumbuhannya yang pesat mengubah beberapa ciri fisik kota. Seiring dengan perubahan tersebut, jumlah penduduk juga akan meningkat, dan tentunya jumlah air limbah yang dibuang dari penduduk juga akan meningkat. Untuk itu diperlukan tempat pembuangan akhir dan saluran air yang dapat

mengalirkan air ke sungai hendaknya genangan air tidak terjadi yang menghambat kegiatan kelompok sosial.

Drainase merupakan satu diantara elemen fundamental dalam perencanaan pembangunan karena merupakan infrastruktur fundamental yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan drainase berfungsi antara lain untuk membuang curah hujan untuk irigasi, keindahan kota, atau persediaan air. Sebagai bentuk irigasi untuk curah hujan, selokan memainkan fungsi penting di kota. Daerah resapan air dapat menyusut seiring bertambahnya jumlah bangunan karena daerah resapan tertutup oleh struktur bangunan. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan terjadinya genangan air dalam beberapa jam setelah hujan badai karena air tidak dapat diserap langsung oleh permukaan tanah yang tertutup. Tentu saja datangnya air hujan menjadi mimpi buruk bagi sebagian individu yang berjualan di lokasi rawan banjir. Banjir adalah hasil dari air hujan yang tidak diarahkan dengan benar.

Kota memerlukan adanya suatu sistem Drainase yang bertujuan untuk menawarkan bentuk saluran yang menyalurkan air permukaan dari hujan secepat mungkin ke badan air penerima yang paling dekat, misalnya sungai. Infrastruktur dan fasilitas perkotaan tumbuh lebih cepat di tempat-tempat pada jumlah penduduk yang padat serta besar. Di Indonesia, Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 mengatur bagaimana sistem drainase perkotaan dikelola. Air limbah perkotaan diciptakan sebagai air limbah ramah lingkungan berdasarkan peraturan ini dengan tujuan mencegah banjir dan menumbuhkan lingkungan hidup yang sehat. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan pengelolaan air, pemanfaatan, dan konservasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang salah satunya adalah kuantitas sumber daya alam hayati. Ini melibatkan kesadaran akan upaya konservasi dan ekologi.

Data yang bersumber dari Dinas PUPR, terdapat 121 titik banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2020. Jumlah lokasi banjir yang paling banyak berdasarkan titik banjir pada kota Pekanbaru berada di kecamatan Binawidya dan Tuah Madani.

Penyelenggaraan Dinas PUPR dan pembersihan sampah yang menyumbat saluran air sangat diperlukan sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang kota di Pekanbaru. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah bisa menjadi masalah. Saat ini tengah meningkat permasalahan drainase penyebabnya sampah dan lumpur yang menyumbat saluran, sehingga membuat saluran tidak beroperasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena secara sengaja (purposive) setelah melihat jumlah permasalahan banjir akibat drainase yang kurang efektif cukup tinggi di wilayah Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data melalui *Data Collection* (pengumpulan data) *Data Reduction* (reduksi data), dan *Display Data* (penyajian data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pencapaian suatu kegiatan, program, atau pelaksanaan kebijakan tertentu dalam mencapai tujuan, sasaran, tujuan, dan visi organisasi disebut sebagai kinerja organisasi. Akibatnya, disini penekanan ditempatkan pada pengelolaan sub-tujuan serta hasil tinjauan mereka, selain untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan membutuhkan kriteria keberhasilan berupa tujuan tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat menilai kinerjanya.

Penulis studi ini menerapkan teori kinerja Agus Dwiyanto. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana organisasi pemerintah bekerja, memungkinkan penulis untuk menjelaskan bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara lebih rinci. Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas adalah komponen kunci dari gagasan kinerja yang dimaksud. Berdasarkan indikator yang akan dituju, terdapat berbagai permasalahan krusial yang harus diperhatikan dan diperbaiki agar Dinas PUPR dapat mengelola atau melakukan pemeliharaan drainase di Kota Pekanbaru.

Produktivitas

Produktivitas mengukur seberapa berhasil perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemanjuran layanan diukur serta tingkat produktivitas. Rasio input terhadap output adalah bagaimana produktivitas biasanya didefinisikan. Dengan menambahkan salah satu indikator kinerja utama seberapa baik kinerja pelayanan publik dibandingkan dengan ekspektasi Konsep Produktivitas bertujuan untuk memberikan definisi produktivitas yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permasalahannya. Pada tahun 2021 lalu Persentasi Titik Banjir terselesaikan realisasi sampai dengan tahun 2021 baru tercapai 46,5%,

sehingga ada kekurangan target 45%, untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103,33%. Untuk permasalahan titik banjir/titik genangan yang tidak mencapai target karena adanya titik genangan baru akibat curah hujan yang cukup tinggi.

Kualitas Layanan

Pentingnya isu kualitas pelayanan dalam menganalisis kinerja organisasi pelayanan publik cenderung berkembang seiring berjalannya waktu. Ketidakpuasan publik dengan tingkat layanan yang diperoleh oleh organisasi publik merupakan kontributor utama buruknya persepsi masyarakat terhadap mereka. Di sini, organisasi publik menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima dapat digunakan untuk menentukan orientasi kualitas pelayanan. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota Pekanbaru melalui Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air rutin melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari, khususnya untuk drainase kecil yang memiliki lebar kurang dari 1 M sedangkan drainase yang memiliki lebar lebih dari 1 M ditugaskan kepada Bidang SDA.

Responsivitas

Kemampuan menilai kebutuhan masyarakat, membuat agenda dan prioritas pelayanan, serta melaksanakan program pelayanan publik yang sejalan dengan kebutuhan dan ambisi masyarakat adalah daya tanggap. Sederhananya, tanggap dalam konteks ini berarti program dan kegiatan pengabdian sejalan dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat. Daya tanggap penyedia dapat diukur dengan bagaimana mereka menanggapi keprihatinan, gagasan, dan kritik masyarakat, dan indikator ini akan melihat bagaimana kemampuan Dinas PUPR dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Responsivitas DPUPR dalam melakukan pengelolaan drainase sudah baik, hal itu dapat dilihat bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada DPUPR yaitu melalui perangkat daerah, pengaduan dilakukan dalam bentuk surat yang kemudian dikirim ke DPUPR. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim akan langsung melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap drainase yang bermasalah oleh tim yang diturunkan ke lapangan, setelah itu hasilnya akan disampaikan ke bidang SDA untuk kemudian dilakukan analisa agar mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya.

Responsibilitas

Tanggung jawab menggambarkan jika pelaksanaan operasi organisasi publik dilakukan sejalan dengan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip administrasi sehat,

atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Responsibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip administrasi atau kebijakan organisasi, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga melakukan kerjasama dengan instansi lain, baik instansi Pemerintah yang ada di Kota Pekanbaru ataupun yang berada diluar Kota Pekanbaru, karena tidak semua drainase yang ada di Kota Pekanbaru merupakan aset Pemko Pekanbaru. Maka dari itu perlunya ada koordinasi dengan instansi Pemko diluar Kota Pekanbaru.

Akuntabilitas

Ketika kita berbicara tentang akuntabilitas publik, kita berbicara tentang seberapa besar kemampuan pejabat publik terpilih untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan lembaga publik. Bagaimana penyampaian layanan publik dapat dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan kepada pemerintah disebut sebagai akuntabilitas publik. Apakah sesuatu dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan atau tidak, akuntabilitas tetap diterapkan. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tugas seseorang atau unit untuk mengawasi dan mengarahkan penggunaan kebijakan dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka agar secara konsisten memenuhi tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program melalui perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dinas dalam melakukan pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru adalah:

1. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kegiatan. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana dalam konteks ini. Dalam hal proses manajemen, hal lain yang menjadi pendukung utama. Prasarana dan sarana di Dinas PUPR merupakan kendaraan yang lama atau terlalu tua dan memerlukan kendaraan yang modern yang dapat menunjang pengelolaan.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam Proses pengelolaan atau pemeliharaan, tidak hanya Kondisi Drainase yang menghalangi namun kurang sadarnya masyarakat saat mendorong DPUPR dalam hal kebersihan setempat.

SIMPULAN

Untuk menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penulis menggunakan teknik kualitatif yang mengacu pada teori Agus Dwiyanto. Dari analisis ini dapat ditentukan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permasalahannya. Pada tahun 2021 lalu Persentase Titik Banjir terselesaikan realisasi sampai dengan tahun 2021 baru tercapai 46,5%, sehingga ada kekurangan target 45%, untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103,33%. Untuk permasalahan titik banjir/titik genangan yang tidak mencapai target karena adanya titik genangan baru akibat curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, Bidang Sumber Daya Air menargetkan untuk menyelesaikan 180 titik masalah yang menyebabkan banjir (tidak hanya permasalahan drainase). Terdapat 57 titik masalah yang belum terselesaikan dan ada 123 titik masalah yang diprediksi akan berulang. Realisasi per 29 Januari 2023, ada 29 titik masalah yang sudah diselesaikan. Sejauh ini pihak PUPR telah berupaya untuk meningkatkan hasil kinerja dalam pengelolaan drainase dan juga penyelesaian masalah banjir di Kota Pekanbaru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat target dan jadwal pembersihan saluran sungai dan drainase oleh Tim Operasi dan Pemeliharaan. Selain itu pemeliharaan juga dilakukan oleh bidang Bina Marga (pasukan kuning) yang turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota Pekanbaru melalui Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air rutin melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari, khususnya untuk drainase kecil yang memiliki lebar kurang dari 1 M sedangkan drainase yang memiliki lebar lebih dari 1 M ditugaskan kepada Bidang SDA. Selanjutnya, Responsivitas DPUPR dalam melakukan pengelolaan drainase sudah baik, hal itu dapat dilihat bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada DPUPR yaitu melalui perangkat daerah, pengaduan dilakukan dalam bentuk surat yang kemudian dikirim ke DPUPR. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim akan langsung melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap drainase yang bermasalah oleh tim yang diturunkan ke lapangan, setelah itu

hasilnya akan disampaikan ke bidang SDA untuk kemudian dilakukan analisa agar mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Kemudian Responsibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip administrasi atau kebijakan organisasi, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga melakukan kerjasama dengan instansi lain, baik instansi Pemerintah yang ada di Kota Pekanbaru ataupun yang berada diluar Kota Pekanbaru, karena tidak semua drainase yang ada di Kota Pekanbaru merupakan aset Pemko Pekanbaru. Maka dari itu perlunya ada koordinasi dengan instansi Pemko diluar Kota Pekanbaru. Dan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program melalui perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pengelolaan drainase masih belum maksimal, karena adanya beberapa faktor penghambat diantaranya Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga hasil dalam melakukan pekerjaan kurang maksimal, dan juga faktor kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2. Hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola drainase di Kota Pekanbaru yaitu faktor sarana dan prasaran yang kurang memadai, rata-rata alat berat yang dimiliki Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah cukup tua sehingga mempengaruhi dalam proses pekerjaan yang dilakukan. Selain factor sarana dan prasarana, juga terdapat faktor Kesadaran Masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses pengerjaan Dinas PUPR dalam menjaga kebersihan saluran drainase,

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.A, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Armstrong M. and Baron, A. (1998). *Performance Management-The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.
- Asmorowati, E. T. (2021). *DRAINASE PERKOTAAN*. Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- Baban Sobandi, dkk. (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung.

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Dwiyanto, Agus (2006). *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja (Teori dan Aplikasinya)*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, H. (2002). *Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kartono, K. (2010). *Psikologi Sosial Perusahaan dan Industri*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koontz, Harold. Cyril O'Donnell, dan Heinz Weihrich. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Petama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Malayu, S.P. Hasibuan (2014). *Organisasi dan motivasi, dasar peningkatan produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. (2010). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moeherjono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2007, *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan, Edisikelima, Salemba Empat*, Jakarta
- Pradjudi, A. (2006). *Konsep Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruky, A. (2002). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saidah, H. d. (2021). *Drainase Pektotaan* . Yayasan Kita Menulis.
- Sedarmayanti, (2004). *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Fokus media. Bandung
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, R. T. (2021). *KOMUNIKASI ORGANISASI* . Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Sondang, P. S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

- Sulistiyani, dkk. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik)*. Jawa Timur: Graha Ilmu.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi. (2006). *Motivasi dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yeremis, T. K. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Gaya Media.
- Zaharuddin, S. d. (2021). *Gaya Kepemimpinan & Kinerja Organisasi*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Jurnal & Skripsi:
- Amalia, H. (2021). Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 12, Nomor 1, hlm. 1-62
- Anggraini, d. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pemabangunan Dan Pemeliharaan Drainase Di Desa Air Panas Sungai Abu Kabupaten Kerinci . *Dipublikasikan*.
- BORU, D. R. (2021). Evaluasi Kinerja Sitem Drainase Di Kota Nganjuk. *Dipublikasikan*.
- Fairizi, D. (2015). Analisis Dan Evaluasi Saluran Draniase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. [Vol 3, No 1, tahun \(2015\)](#).
- Hikmah, A. T. (t.thn.). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UKM (Studi Kasus UKM DI Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah*, [Vol 2, No 1, hlm. 102-114](#), tahun [\(2013\)](#).
- Ismoyo. (2017). Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. *Forum Ilmu Sosia*, [Vol 44, No 1, hlm. 18-26](#), [tahun \(2017\)](#).
- Juru, N. A. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, [Vol 4, No 2, hlm. 408-421](#), [tahun \(2020\)](#).
- LUBIS, E. S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemeliharaan Tata Kelola Air Dan Drainase Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. *Dipublikasikan*.
- Putri, L. D. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pamong Belajar Pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Di Wilayah Priangan Jawa Barat. *Jurnal PendidikanLuar Sekolah*, [Vol 4, No 1, hlm. 47-50](#), [tahun \(2020\)](#).
- SALSABILA, U. (2021). Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Dipublikasikan.

Sunarno, d. (2015). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sistem Drainase Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Banjir (Studi Kasus di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur). *Dipublikasikan.*

Siagian, T. F. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Pada CV. UNION EVENT PLANNER. *AGORA*. [Vol 6, No 1, tahun \(2018\).](#)

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Indonesia No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah